



**FRAKSI PKB**  
DPRD KOTA SALATIGA

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DPRD KOTA SALATIGA**

: Ahmad Musadad

**Disampaikan Pada :** .....

: H. Basim  
**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

: Eko Purnomo

: 1. Saiful Mashud, S.Sos. | **Salatiga, 16 Juni 2025**

2. M. Miftah, SE





**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang Terhormat Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga**

**Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga**

**Ykh. Sekretaris Daerah beserta jajaran Forkopimda Kota Salatiga**

**Ykh. Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga**

**Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;**

**Ykh. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga**

**Ykh. Para Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD, dalam rangka penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, dalam keadaan sehat wal aafiyah tak kurang suatu apapun.

***Bapak-bapak ibu-ibu dan para hadirin yang saya hormati***

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, serta memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam system tata kelola keuangan daerah, dengan



tujuan untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Salatiga TA 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian. Atas hasil tersebut, **Fraksi PKB memberikan Apresiasi yang setulus-tulusnya atas kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah, yang telah berhasil mempertahankan WTP untuk yang ke Sembilan kali secara berturut-turut.** Semoga prestasi ini bisa terus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitasnya pada tahun-tahun mendatang,

### ***Bapak-bapak ibu-ibu dan para hadirin yang saya hormati***

Setelah menyimak, membaca dan mencermati pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024, sebagaimana tadi secara garis besarnya telah disampaikan oleh Sdr. Walikota. Maka, izinkan kami Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

#### **I. Pendapatan Daerah.**

Pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.038.143.488.453. (*Satu triliun tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*) atau mencapai 101,59 persen, dari target sebesar Rp. 1.021.905.073.561,-. (*Satu Triliun dua puluh satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) Dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.867.189.955,- (*Lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*) atau 5,15%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan sangat efektif karena jika dilihat, perbandingan antara target dengan realisasi mampu mencapai rasio 100% lebih, Terhadap capaian tersebut, Fraksi PKB



memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, semoga kedepan atau terus bisa ditingkatnya sesuai dengan potensi pendapatan daerah.

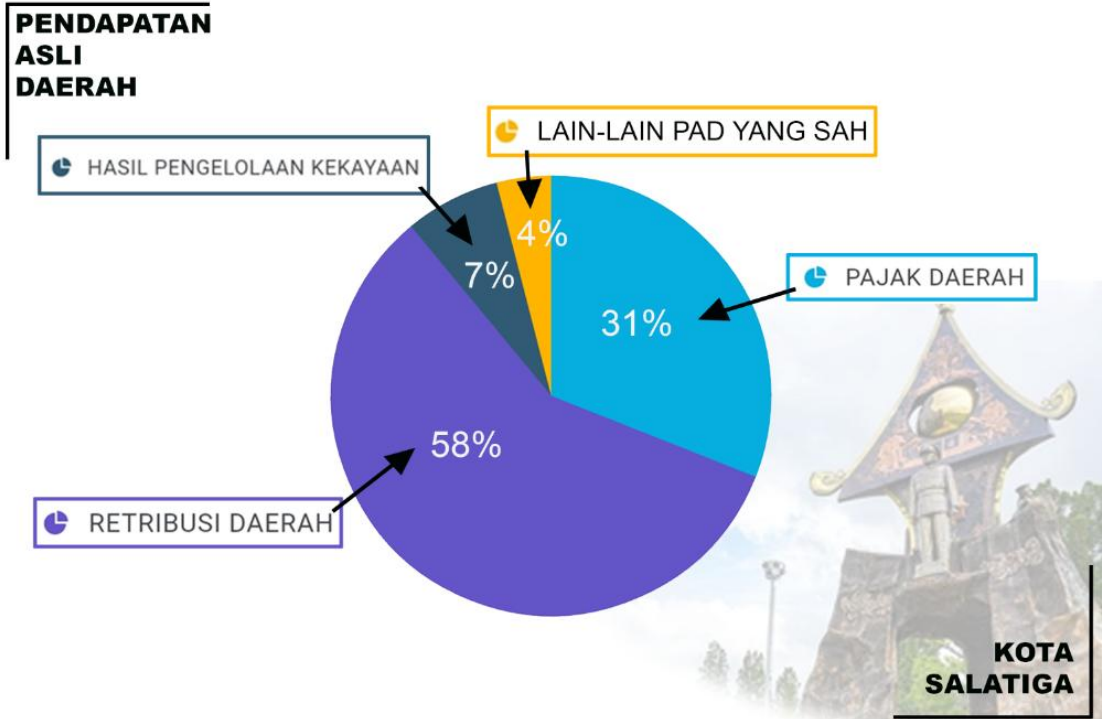
Fraksi PKB mencermati, bahwa persentase komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (30,24%), Pendapatan Transfer (69,75%) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (0,001%). Hal ini menunjukkan bahwa, pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah masih sangat tinggi ketergantungannya terhadap pendapatan transfer dari pusat. Dan angka ratio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 30%, naik 1% jika dibandingkan dengan ratio yang sama pada realisasi pendapatan tahun 2023.

Melihat data tersebut, Fraksi PKB minta penjelasan. Langkah-langkah kongkrit apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah...?

Fraksi PKB siap memberikan masukan, saran dan akan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dengan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah dan merealisasikannya secara efektif dan efisien. Dengan tetap berpegang teguh pada asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kemaslahatan umat, kesederhanaan, keterbukaan dan sesuai kemampuan masyarakat.

Untuk itu, Fraksi PKB juga meminta kepada pemerintah daerah, agar menyampaikan dan atau menyajikan data potensi pendapatan asli daerah, pada setiap akun pendapatan asli daerah. Agar dalam menentukan perencanaan target-target pada setiap akun pendapatan asli daerah lebih terukur dan realistis.

Sementara itu, pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 313.963.681.492,- (*Tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*). Terdiri dari Pajak Daerah (31%), Retribusi Daerah (58%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (7%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (4%).



Dari data tersebut, terlihat bahwa komponen Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang dipungut dari rakyat menjadi penopang utama komponen Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 89%.

Fraksi PKB menegaskan kepada pemerintah daerah, bahwa salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas di berbagai sektor. Sebagaimana diamanahkan undang-undang pemerintah daerah. Dengan pelayanan publik yang berkualitas, juga dapat mempercepat pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang maju adil, sejahtera dan berkelanjutan.

Mencermati data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber komponen Retribusi Daerah sebesar Rp. 181.486.329.234,- (*Seratus delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut 90% bersumber dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni sebesar Rp. 163.548.597.224,- (*Seratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat*



*rupiah*). Dan dari jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut, 94% bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, yakni sebesar Rp. 153.755.080.579,- (*seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*). Sementara itu pendapatan rumah sakit di luar retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 2.627.396.257,- (*Dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*). Jika dihitung Ratio Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Non Layanan Kesehatan RSUD sebesar 50% dari jumlah total pendapatan asli daerah.

Dari data tersebut, diketahui bahwa retribusi pelayanan kesehatan dan Pendapatan RSUD merupakan jantung penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat utamanya di bidang kesehatan.

Fraksi PKB meminta agar pemerintah daerah serius dalam mengelola RSUD dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit yang baik (*Good Hospital Governance*). Hal ini sangat penting untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam operasional rumah sakit. Fraksi PKB berkomitmen akan mendukung upaya-upaya peningkatan pelayanan RSUD Salatiga yang prima dan mendunia.

### ***Rapat paripurna yang terhormat***

#### **II. Belanja Daerah**

Ratio perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar 93,01%. Yakni dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.120.058.076.035,- (*Satu triliun seratus dua puluh miliar lima puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah*). Terealisasi sebesar Rp. 1.041.750.433.639,- (*Satu triliun empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).



Merujuk pada tolak ukur kategori serapan anggaran yaitu 90% s/d 94,99% masuk pada kategori sedang. Fraksi PKB menghargai atas upaya-upaya yang sudah dilakukan dan meminta penjelasan mengapa tidak bisa mencapai 100%. Hal ini penting untuk memantau serapan anggaran di tahun-tahun selanjutnya dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi (89%) Rp. 935.877.484.420,-, (*Sembilan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*), Belanja Modal (10,12%) Rp.105.442.495.969,- (*seratus lima miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*) dan Belanja Tak Terduga (0,04%) Rp. 430.453.250,- (*Empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*). Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023, Belanja Operasi mengalami penurunan -1,04%, Belanja Modal naik sebesar 1,06% dan Belanja Tidak Terduga turun sebesar -0,02%.

Mencermati data tersebut, Fraksi PKB merekomendasikan agar belanja daerah harus terus diupayakan bersama (penyelenggara pemerintah daerah) menuju proporsi ideal yakni, 60% Belanja Operasi, 38% Belanja Modal dan 2% Belanja Tidak Terduga. Belanja Daerah yang cerdas dan terarah, akan berdampak positif bagi rakyat, semakin meningkatnya pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan, serta berkurangnya kemiskinan.

Menyoroti Belanja Operasi ada komponen Belanja Pegawai (45,62%), Belanja Barang dan Jasa (50,52%), Belanja Subsidi (0,01%), Belanja Hibah (3,79%) dan Belanja Bantuan Sosial (0,07%). Khusus, untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 455.186.056.380,- (*Empat ratus lima puluh lima miliar seratus*



*delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), jika dibandingkan dengan total anggaran Belanja Daerah persentasenya sebesar (40,98%). Persentase belanja pegawai mengalami peningkatan 1,5% dari tahun 2023 sebesar (39,49%).

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) bahwa “Pemerintah daerah harus memastikan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen per 1 Januari 2027”.

Melihat kondisi tersebut, Fraksi PKB merekomendasikan agar pemerintah daerah segera membuat perencanaan serius untuk mencari solusi guna menurunkan persentase belanja pegawai.

Selanjutnya terkait catatan-catatan penting atas hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2024. Khususnya pada bab ikhtisar pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan sebelumnya (2020-2024). Fraksi PKB mendorong agar segera ditindak lanjuti.



***Rapat paripurna yang terhormat***

Demikian pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa kami sampaikan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kiranya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.

***Wallahul Muwaffiq ila aqwaamiththariq,  
Wassalaamu'alikum Wr., Wb.,***

Salatiga, 16 Juni 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Ketua : Ahmad Musadad

Wk. Ketua : H.Basirin

Sekretaris : Eko Purnomo

Anggota : 1. Saiful Mashud, S.Sos.I

2. M. Miftah, SE